

152
1 Juli 2001

55 Tahun Kepolisian Nasional Indonesia

PERINGATAN 1 Juli tahun ini dilaksanakan Polri dalam saat yang penuh tantangan. Pada 1 Agustus 2001 akan digelar Sidang Istimewa MPR yang belum jelas apa yang akan dihasilkan. Apakah akan mencabut mandat Presiden Abdurrahman Wahid atau menerima pertanggungjawabannya, ataupun masih ada kemungkinan kompromi dalam arti menerima pertanggungjawaban Presiden dengan catatan. BP MPR tidak menyetujui yang terakhir ini, yang diajukan oleh PAH I. Presiden Wahid telah menyatakan tidak akan hadir bila diminta pertanggungjawaban dan tidak akan keluar dari Istana walaupun dikepung oleh tentara. Presiden Wahid juga mengatakan memiliki banyak opsi yang belum diungkapkan.

Akan adakah kerusuhan bila Presiden Wahid diturunkan? Mengenai ini, ada yang berpendapat optimis, yaitu tidak akan ada kerusuhan. Tapi, yang pesimistis menyatakan, bahwa kerusuhan bisa lebih hebat dari peristiwa Mei 1998. TNI, Polri dan Pemda DKI telah bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Kekuatan pengamanan oleh masyarakat pun diikutsertakan.

Akhir-akhir ini unjuk rasa dan kerusuhan yang dipicu oleh kenaikan harga BBM dan Kepmennakertrans 78/2001 kembali marak, seperti yang terjadi di Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta.

Perlu pula diingat bahwa keamanan di Aceh, Maluku, Irian, dan lain-lain belum pula pulih. Kejahatan narkoba, *money laundering*, aksi 'teroris' menggunakan bom, di samping kejahatan tradisional yang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif, telah menimbulkan *fear of crime* di tengah-tengah masyarakat, terutama di kota-kota.

Ini semua terjadi dalam keadaan ekonomi yang belum menampakkan pemulihan, juga kemacetan APBN, hubungan dengan IMF, dan lain-lain. Cita-cita demokratisasi, supremasi hukum, *civil society*, *good governance*, dan lain-lain yang diharapkan dari reformasi malah bertambah kabur.

Dr Awaloedin Djamin

Mantan Kapolri

Keputusan Presiden mengenai susunan organisasi baru Polri, dengan jabatan Wakapolri dihapus, disusul dengan pengangkatan Komjen Pol. Drs. Chaeruddin menjadi Wakapolri merupakan sebuah kekeliruan. Namun, kekeliruan ini 'diperbaiki' dengan mengeluarkan Keppres baru, yakni menghidupkan lagi jabatan Wakapolri, yang berlaku surut sampai 1 Juni 2001. Di samping itu ada pula Keppres yang menonaktifkan Jenderal Pol. Drs. S. Bimantoro sebagai Kapolri. Karena tidak jelas latarbelakang ini semua, maka tentunya terjadi kebingungan dalam jajaran kepolisian sendiri atau di kalangan masyarakat.

Syukur pada pimpinan Polri dapat menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan hingga tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan yang sangat berat dewasa ini.

Reformasi Internal

Sebagai Kepolisian Nasional, yang ditetapkan tanggal 1 Juli 1946, dan sesuai dengan tren kepolisian di dunia serta otonomi daerah, maka salah satu prioritas Polri adalah memperkuat Polres (dengan Polsek sebagai ujung tombak). Karena prestasi dan citra Polri sebagai penegak hukum dan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat tergantung dari Polres: 'kesatuan operasional dasar' (*basic police unit*). Polres adalah kesatuan kewilayahan Polri yang terdekat dengan masyarakat dan otonomi daerah tingkat II. Perilaku dan budaya baru Polri paling dirasakan tingkat Polres dan Polseknya. Hubungan dengan bupati/walikota, DPRD Tk II dan tokoh-tokoh masyarakat, paling menentukan keberhasilan Polri secara nasional. Bila 'desentralisasi' Polres berjalan lancar, maka masalah hubungan Polri dengan otonomi daerah dapat dipecahkan. Hanya tugas dan tanggung jawab penyidikan, karena menyangkut hak asasi manusia, dilaksanakan Penyidik

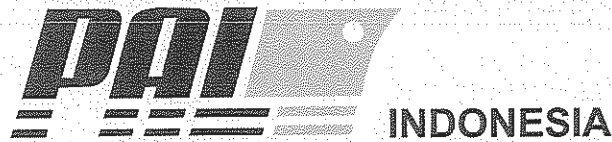
Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang diatur dalam KUHP.

Hubungan Polri dan TNI di samping yang diatur dalam TAP MPR No VI dan VII, harus diatur lebih lengkap dalam 'RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya' yang sekarang berada di tangan pemerintah. Mengubah Kepolisian RI yang lahir seiring dengan detik-detik Proklamasi (Kapolri pertama RS Soekanto dilantik tanggal 29 September 1945) menjadi Kepolisian Nasional Indonesia pada tanggal 1 Juli 1946, adalah keputusan visioner, melihat jauh ke depan oleh Soekarno, Hatta dan Syahrir, karena *National Police System* adalah yang termodern di dunia. Jepang, Filipina, Thailand, Singapura dan bahkan Malaysia yang federal, menganut *National Police System*. Negara-negara federal lainnya mempraktekkan *National Coordinated Police*.

Dalam sejarah Polri, suatu momen penting adalah waktu Inspektur I M. Jasim pada tanggal 21 Agustus 1945, menyatakan "Proklamasi: Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perjoengan mempertahankan proklamasi 17 Agoestoos 1945, dengan ini menjatakan Polisi sebagai Polisi Repoeblik Indonesia."

Sekarang Polri sebagai Kepolisian Nasional telah berumur 55 tahun. Di samping usaha Polri sendiri untuk benar-benar melaksanakan reformasi internal secara tepat dan berencana, keberhasilan membangun Polri yang mandiri, profesional, sebagai penegak hukum yang tidak berpilah (*equality before the law*), pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat yang responsif, juga sangat tergantung elit politik, terutama presiden.

Polri bukan milik Polri sendiri, tetapi Polri adalah milik bangsa dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena itu persatuan dan kesatuan Polri serta pembangunannya menjadi Polri yang mandiri dan profesional harus didukung oleh semua pihak demi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia.



DIREKSI, STAF DAN KARYAWAN

PT. PAL INDONESIA

**MENGUCAPKAN DIRGAHAYU
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

(P O L R I)

KE 55

1 Juli 1946 - 1 Juli 2001

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)

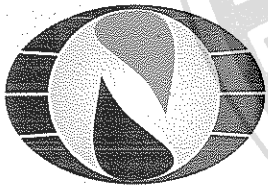
Mengucapkan

DIRGAHAYU

POLRI

KE-55

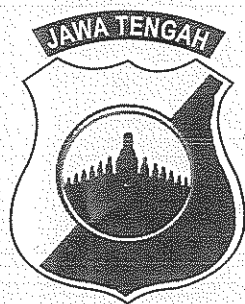
1 Juli 1946 - 1 Juli 2001



**JAKARTA HILTON
INTERNATIONAL**

Hospitality At Its Royal Best

JAKARTA HILTON INTERNATIONAL
JL. GATOT SUBROTO, P.O. Box 3315, Jakarta 10002, Indonesia
Tel: +62 (21) 570-3600 Fax: +62 (21) 573-3089
e-mail: salesjkt@jkhilton.com <http://www.hiltonindonesia.com>

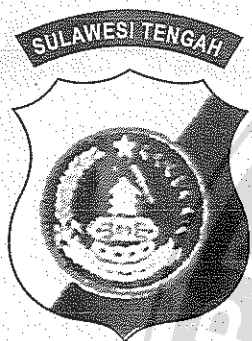


**KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
MENGUCAPKAN
DIRGAHAYU POLRI
KE-55**

1 Juli 1946 - 1 Juli 2001

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

**Drs. M.A. ERWIN MAP
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**



KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH

Mengucapkan

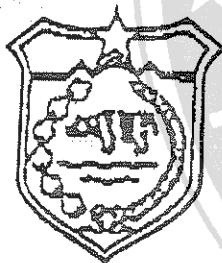
DIRGAHAYU POLRI KE-55

1 Juli 1946 - 1 Juli 2001

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTENG

ttd.

**Drs.Hi. Zainal Abidin Ishak, SH
BRIGADIR JENDERAL POLISI**



**Bupati beserta seluruh staf
Pemerintah Kabupaten Pandeglang
mengucapkan**

Dirgahayu Polri ke-55

1 Juli 1946 - 1 Juli 2001

*"Mari kita galang persatuan dan kesatuan, serta kita tegakkan
supremasi hukum"*

**Bupati
HA Dimiyati Natakusumah**

**Wakil Bupati
Drs H Moch Mudjio A Satari, MM**



P7. Andalas Advertising
PROMOTION - PUBLISHING & MARKETING

Siang Malam Membela Asa Menuai Rasa Merangkai Nusantara

Head Office : Jl. Madu Ujung Curug No. 34 Kalimalang - Jakarta Timur 13450

Telp. (021) 8654839, 8656781, 8656287, 8656338, 8656751, 8657512

8657189, 8654841 HP. : 081-8782169 Fax. (021) 8656781 E-mail : raynatha@centrin.net.id